

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan buruknya pengelolaan dan buruknya birokrasi (Dewi, 2016).

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Terkait dengan proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, di Indonesia proses tersebut dilakukan oleh seorang auditor pemerintah yang terdiri dari: Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawasan Intern (SPI) dilingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai auditor internal pada pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab besar yaitu menciptakan proses tata kelola pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (KKN) serta penerapan sistem pengendalian manajemen (Pradita, 2014).

Dalam pelaksanaannya, BPKP memiliki dasar hukum yaitu pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103/2001 mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPKP dalam melakukan fungsi audit diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBD) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi; pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri.

Khusus auditor sektor publik (pemerintah) misalnya yang berada di instansi BPKP dan BPK selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai PNS, mereka juga dituntut untuk menaati kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta standar audit APIP atau standar audit lainnya yang telah ditetapkan. Kegiatan utama APIP meliputi antara lain: audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultasi.

BPKP Lampung terhambat memberikan hasil audit atas pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Lampung Timur, Satono. Apabila belum ada hasil audit dari BPKP, tidak diperkenankan untuk meminta izin kepada Presiden. BPKP dinilai lambat menghitung kerugian negara atas kasus korupsi tersebut secara detail. Satono dituduh mengendapkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp172,5 miliar.

<https://antikorupsi.org/id/news/5-10-2018>

Peneliti menduga bahwa kasus tersebut disebabkan oleh kurangnya sikap profesionalisme serta kurangnya kompetensi yang dimiliki auditor pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga mengakibatkan auditor pemerintah terkesan lamban dalam memeriksa kasus tersebut.

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidaksielarasan informasi. Hasil dari audit juga sangat penting digunakan seperti Instansi Pemerintahan Perusahaan, Investor, Kreditor, Bapepam dan pihak lain yang terkait untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis dan memberikan keyakinan serta memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan (Hidayat, 2011).

Berdasarkan fenomena diatas penulis mengambil pemilihan lokasi penelitian pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) Perwakilan Lampung. Karena berbagai penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas, independensi, kompetensi maupun profesionalisme auditor masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Berdasarkan penjelasan berbagai variabel dari hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa kemungkinan kasus-kasus auditor pemerintah disebabkan oleh faktor faktor akuntabilitas, independensi, kompetensi dan profesionalisme auditor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Budiyanto, 2016), meneliti tentang Pengaruh Faktor Kompetensi, Independensi dan Sikap Profesional Terhadap Kualitas Audit dalam Meningkatkan Kinerja Auditor Pemerintah. Dimana pengujian dilakukan menggunakan alat SPSS sebagai alat ujinya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu menambahkan variabel independen yaitu Akuntabilitas dan Profesionalisme Auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Lampung Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat judul “ **Pengaruh**

Akuntabilitas, Independensi, Kompetensi dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas, independensi, kompetensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit ?
2. Apakah Independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit ?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit ?
4. Apakah Profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Akuntabilitas Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Lampung.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Independensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Lampung.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Lampung.

4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian dan juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi IIB Darmajaya. Serta dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pihak yang terkait yaitu auditor pemerintah BPKP.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan, bahan referensi, dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini dan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan kinerja dan perilaku terhadap kualitas auditor.

c. Bagi Auditor

Sebagai tinjauan literatur yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya dan diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor pemerintah. Serta hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja auditor pemerintah, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk terus mengembangkan profesi akuntan publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menggunakan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, mengenai apa saja populasi dan sampel yang digunakan, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa yang dilakukan.

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

Bab V : Simpulan Dan Saran

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Lampiran